

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas bimbingan dan petunjukNya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Enrekang Tahun 2018 dapat tersusun dengan baik.

Tahun 2018 menandai tahun pertama perubahan nomenklatur DPMD Kab. Enrekang menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016. Tentunya perubahan ini membawa konsekuensi pada peluang dan tantangan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sangat dinamis dan semakin kompleks.

Melalui penyusunan laporan ini kami berusaha untuk memberikan data yang akurat sehingga laporan yang tersaji dapat memberikan informasi mengenai kinerja DPMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018. Walaupun laporan ini disajikan dengan sangat sederhana namun ada nilai potensi, motivasi, etos kerja dan semangat kebersamaan sehingga LAKIP DPMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018 dapat terselesaikan dengan baik.

Demikian laporan ini dibuat kiranya dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kita semua.

Plt. Kepala DPMD Kab. Enrekang

**Dra.Hj. ZUBAEDAH BANDO, M.AP**

Pangkat : Pembina Utama Muda

N I P. : 19671231 199312 2 007

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Dalam era globalisasi, komitmen pemerintah untuk mewujudkan Good Governance dan Clean Governance semakin kuat. Hal tersebut sesuai dengan harapan para stakeholders Pemerintah dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, profesional, transparan, akuntabel dan bebas KKN. Tuntutan tersebut telah diakomodasikan dalam ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan penyelenggara Pemerintahan pusat dan daerah untuk menyusun LAKIP setiap akhir tahun anggaran mulai tahun 2000.

Dilandasi kesadaran yang sangat mendalam akan pentingnya akuntabilitas publik baik bagi manajemen maupun bagi stakeholders, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Enrekang menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2018 yang mengacu kepada Pedoman Penyusunan LAKIP yang diterbitkan oleh LAN sebagai laporan akuntabilitas atas hasil pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2018. Laporan Akuntabilitas DPMD Kabupaten Enrekang mengungkapkan keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai sasaran organisasi. Disamping itu, LAKIP juga mengungkapkan faktor pendukung keberhasilan, hambatan pencapaian sasaran serta strategi perbaikan di masa mendatang.

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa DPMD Kabupaten Enrekang telah berhasil mencapai sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari persentase capaian hasil kinerja sasaran yaitu tingkat capaian kinerja sasaran secara keseluruhan adalah sebesar 100 % yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran. Dari 12 sasaran yang ditetapkan seluruhnya telah mencapai target yang telah ditetapkan sedangkan realisasi penggunaan anggaran sebesar 99,81% dari total anggaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan sasaran tersebut tak lepas dari hasil kerja keras segenap perangkat DPMD Kabupaten Enrekang serta partisipasi seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan cita-cita daerah.

Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang DPMD Kabupaten Enrekang telah menetapkan beberapa strategi, antara lain dengan meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan, peningkatan kemampuan pengelola kegiatan, penyempurnaan implementasi anggaran berbasis kinerja dan jangkauan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan.

Kami menyadari bahwa informasi yang disajikan dalam LAKIP belum sepenuhnya dapat memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan. Karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan LAKIP di masa yang akan datang.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Gambaran Umum**

Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah antara lain menegaskan bahwa “Pemberian Otonomi Luas kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat”. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, penyertaan peran serta, prakarsa dan Pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada Peningkatan kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu kebijakan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang diletakkan di Daerah Kabupaten dan Kota.

Bertitik tolak pada hal tersebut di atas, bahwa salah satu upaya mempercepat kesejahteraan masyarakat adalah melalui Pemberdayaan Masyarakat dan dalam rangka itu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka dibentuklah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Enrekang.

Jumlah Aparatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang sebanyak 24 orang, dengan klasifikasi sebagai berikut :

- Menurut golongan
  - a. Golongan IV : 2 Orang
  - b. Golongan III : 22 Orang

- c. Golongan II : 0 Orang
- Menurut Pendidikan
  - a. S.2 : 2 Orang
  - b. S.1 : 20 Orang
  - c. D.IV : 0 Orang
  - d. D.III : 1 Orang
  - e. SLTA : 1 Orang
- Menurut Eselon
  - a. Eselon II B : 0 Orang
  - b. Eselon III A : 1 Orang
  - c. Eselon III B : 3 Orang
  - d. Eselon IV A : 11 Orang
  - e. Staf : 9 Orang
  - f. Tenaga Honor : 16 Orang

Bangunan Kantor Lama DPMD Kab. Enrekang terletak di Jln. Buttu Juppandang No. 77 Kelurahan Juppandang yang saat ini difungsikan sebagai Kantor Baznas Kabupaten Enrekang, sedangkan Bangunan Kantor Baru merupakan Kantor Gabungan Dinas yang terletak di Jln. Jend. Sudirman No. 4 Pinang Kelurahan Leoran.

Sarana transportasi yang dimiliki DPMD sampai saat ini berjumlah :

- a. Kendaraan roda 2 : 19 buah
- b. Kendaraan roda 4 : 2 buah

## **B. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang, dimana DPMD Kab. Enrekang mempunyai tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Untuk

melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana strategis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 2) Perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 3) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pengembangan ketahanan masyarakat, sosial budaya masyarakat, pengembangan usaha ekonomi desa dan teknologi tepat guna serta pembinaan pemerintahan desa;
- 4) Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 5) Melaksanakan kegiatan penatausahaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 6) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **C. Struktur Organisasi**

Susunan organisasi Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

- 3) Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari :
  - a. Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa.
  - b. Seksi Aparatur Pemerintahan Desa.
  - c. Seksi Pelaporan, Keuangan dan Aset Desa.
- 4) Bidang Pembangunan, SDA dan Usaha Ekonomi Desa terdiri dari :
  - a. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa.
  - b. Seksi Pendayagunaan SDA dan Teknologi Pedesaan.
  - c. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan.
- 5) Bidang Pengembangan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, terdiri dari :
  - a. Seksi Ketahanan Masyarakat.
  - b. Seksi Pengembangan Kelembagaan, Adat Budaya Masyarakat.
  - c. Seksi Kerjasama Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa.

## BAB II

### RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang ditetapkan Rencana Strategis sebagai pedoman bagi aparatur DPMD khususnya dan pihak terkait lainnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai Visi dan Misi yang sudah ditetapkan.

##### 1. Visi

Penetapan Visi dimaksudkan untuk memberikan arah bagi suatu instansi termasuk anggotanya mengenai tujuan masa depan yang ingin dicapai sehingga keberadaannya tetap eksis, antisipatif dan inovatif. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi DPMD Kabupaten Enrekang serta mengacu pada RPJMD Kabupaten Enrekang, maka dirumuskan Visi DPMD 2014-2018 yaitu : ***“Terwujudnya Kemandirian Desa dan Keberdayaan Masyarakat Enrekang yang Maju Aman dan Sejahtera pada Tahun 2018”***

##### 2. Misi

Untuk mendukung tercapainya Visi yang sudah ditetapkan dijabarkan ke dalam Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai.

Dengan adanya pernyataan Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang.



Ada 5 (Lima) Misi yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang yaitu :

1. ***Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik;***

Misi ini ditetapkan dengan maksud untuk menjadikan Pemerintahan Desa sebagai motor penggerak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, karena kemajuan dan perkembangan suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan kemandirian pemerintah setempat dalam memanfaatkan dan mengelola segenap potensi yang ada. Disamping itu, Pemerintah Desa diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dengan mensinergikan segenap potensi yang ada.

2. ***Misi Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat;***

Misi peningkatan kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan yang diemban oleh DPMD bertujuan menciptakan suatu kondisi yang dinamis agar Lembaga Kemasyarakatan memiliki kemampuan dan kemandirian dalam melaksanakan tugas dan fungsi yaitu, membantu Pemerintah Desa dan Kelurahan sebagai mitra dalam memberdayakan masyarakat. Pemantapan Kelembagaan meliputi aspek penunjang penataan organisasi, penataan hubungan kerja, pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Kemasyarakatan.

3. ***Misi Penguatan Nilai-Nilai Sosial Budaya Masyarakat;***

Penguatan nilai-nilai sosial budaya masyarakat dimaksudkan untuk mengangkat dan mengembangkan nilai-nilai sosial

budaya setempat untuk menciptakan kondisi sosial budaya yang mantap dan kondusif dalam rangka mendorong proses pembangunan. Nilai-nilai yang diangkat memiliki interkoneksi dengan tatanan lain terutama sejalan dengan perkembangan pembangunan, masih dipelihara dan diakui oleh masyarakat setempat bahkan sangat berperan dalam menciptakan keharmonisan dan ketentraman didalam masyarakat. Nilai-nilai sosial budaya tersebut merupakan suatu “Kearifan Lokal” yang menjadi perekat, semangat, identitas kebanggaan dan kehormatan sebagai suatu persekutuan dalam menghadapi tantangan, hambatan dan permasalahan pembangunan lainnya.

**4. Misi Mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat;**

Misi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat bertujuan untuk pemberdayaan usaha-usaha kecil yang berbasis ekonomi kerakyatan melalui pengembangan potensi sumberdaya ekonomi Desa secara optimal untuk mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.

**5. Misi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna yang Berwawasan Lingkungan;**

Misi pendayagunaan teknologi tepat guna bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alam melalui pemanfaatan teknologi tepat guna bagi masyarakat dalam rangka menghasilkan produk yang berkualitas serta mampu

meningkatkan perekonomian masyarakat, dengan tetap memperhatikan upaya pelestarian lingkungan.

## **B. TUJUAN DAN SASARAN**

Untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi tersebut maka dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah berupa **tujuan** dan **sasaran** yaitu :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan sasaran :
  - a. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa/kelurahan.
  - b. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang baik.
2. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan, dengan sasaran “Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan”.
3. Mengembangkan nilai-nilai sosial budaya dan semangat gotong royong masyarakat, dengan sasaran-sasaran :
  - a. Terwujudnya peningkatan kualitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
  - b. Meningkatnya peran perempuan di perdesaan dalam pembangunan.
4. Mewujudkan pengembangan dan penguatan struktur ekonomi masyarakat, dengan sasaran : “Terwujudnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkualitas”.
5. Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan, dengan sasaran : “Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam berbasis teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan”.

### C. RENCANA KINERJA

Berdasarkan rencana strategi yang sudah ditetapkan, dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kinerja. Rencana Kinerja tersebut meliputi sasaran, indikator, program dan kegiatan. **Program** dan **Kegiatan** yang ingin dicapai pada tahun 2018 sebagai berikut :

Program Utama / Urusan Wajib :

1. **Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan.** Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan, dengan kegiatan :
  - Rakor Pokjanal Posyandu tingkat kabupaten
  - Pembinaan Pokjanal Posyandu
  - Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
  - Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Poduktif
2. **Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan.** Program ini bertujuan untuk mewujudkan Peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan dengan kegiatan :
  - Koordinasi dan Pendampingan Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat
  - Lomba Pembangunan Desa/Kelurahan
  - Pendataan dan Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat
  - Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)
  - Pelaksanaan Pekan Inovasi Desa (PIN Desa)
3. **Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan,**
  - Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan BUMDES
  - Fasilitasi dan Pelatihan Jenis Usaha Kegiatan BUMDES
  - Studi Kerja Pengembangan Usaha BUMDES
  - Pelaksanaan Lomba BUMDES
  - Expo Ekonomi Kreatif
  - Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Pasar Desa

4. **Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa.** Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan kegiatan :
- Pencanangan / Penutupan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Provinsi, Nasional dan Kabupaten
  - Pelaksanaan Lomba BBGRM
  - Pelatihan dan Pembinaan Administrasi Baruga Sayang dan Posdaya Baruga Sayang
5. **Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.** Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparat desa dengan kegiatan :
- Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa
  - Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
  - Studi Kerja Peningkatan Kapasitas Manajerial bagi Kepala Desa yang berprestasi
  - Sosialisasi Peraturan tentang Desa dan Penyuluhan Hukum
  - Bimbingan / Pendampingan Penyusunan APBDES
6. **Program pembinaan administrasi serta penataan pemerintahan.** Program ini bertujuan meningkatkan pembinaan administrasi desa/kelurahan dengan kegiatan sebagai berikut:
- Pemilihan Kepala Desa dan Pelantikan Kepala Desa
  - Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan
  - Penyusunan Regulasi tentang Pemerintahan Desa
  - Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan
  - Sosialisasi dan Evaluasi/Monitoring Pelaksanaan Alokasi Anggaran Desa dan Dana Desa
  - Fasilitasi / Pendampingan Penyusunan RPJMDes dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP)
  - Fasilitasi/Pendampingan dan Pengawasan atas penyampaian laporan pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPJ/ LPPD dan

IPPD akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan Kepala Desa)

- Penyusunan Regulasi tentang kelembagaan desa
- Penyusunan Data Informasi/Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan
- Pengadaan Website DPMD dan Sistem Aplikasi Informasi Perkembangan Desa

7. **Program pengembangan kelembagaan masyarakat di pedesaan/ kelurahan.** Program ini bertujuan meningkatkan peran kelembagaan pedesaan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- Pendataan, Pembinaan dan Monitoring Kegiatan BPD dan LKSMD/K
- Pelatihan Penguatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- Study Kerja Pengurus BPD

8. **Program pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan teknologi tepat guna (TTG),** bertujuan meningkatkan pemanfaatan SDA dan penggunaan TTG, dengan kegiatan sebagai berikut :

- Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Posyantek
- Peningkatan Kapasitas SDM bagi Aparatur dan Pengelola Posyantek/Wartek
- Kerjasama pihak ketiga dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan SDA dan TTG
- Pelaksanaan Gelar TTG Tingkat Kabupaten, Regional dan Tingkat Nasional
- Inventarisir / Penyusunan Data Base Teknologi Tepat Guna (TTG)
- Fasilitasi dan Dukungan Pengadaan Alat Teknologi Tepat Guna (TTG)
- Studi Kerja dalam rangka aplikasi TTG
- Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- Kursus / Pelatihan TTG sesuai kebutuhan masyarakat
- Pembentukan Warung Teknologi (Wartek)

Program Penunjang / Kegiatan Rutin :

**1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan :

- Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- Koordinasi, konsolidasi dalam daerah dan peninjauan lapangan.
- Pengelolaan administrasi keuangan dan perkantoran.
- Penyediaan peralatan kebersihan dan perlengkapan dapur kantor.

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi, dengan kegiatan :

- Pengadaan peralatan gedung / kantor
- Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional
- Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

**3. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal, dengan kegiatan :

- Diklat teknis dan fungsi bagi PNS.

**4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD, dengan kegiatan :

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisari realisasi kinerja SKPD

- Penyusunan pelaporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan akhir tahun.

5. **Program Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran SKPD**

Program ini bertujuan untuk menyusun rencana dan anggaran kegiatan SKPD, dengan kegiatan :

- Penyusunan RKA-SKPD
- Penyusunan DPA-SKPD
- Penyusunan Rencana Kerja SKPD



### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **A. PENGUKURAN KINERJA**

LAKIP DPMD Kabupaten Enrekang tahun 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap akuntabilitas publik. Pengukuran capaian kinerja tahun 2018, berpedoman pada SK LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 dengan terlebih dahulu menetapkan indikator-indikator kinerja, yaitu *input* (masukan), *output* (keluaran), *outcome* (hasil). Sedangkan indikator *benefit* (manfaat) dan *impact* (dampak) belum bisa diukur pada tahun yang bersangkutan. Pengukuran kedua indikator tersebut tidak dapat diimplementasikan hanya pada satu kegiatan saja, akan tetapi sangat terkait dengan kegiatan lainnya. Selain itu, untuk pengukuran kedua indikator tersebut menggunakan metode penilaian tersendiri yang terkait dengan evaluasi kebijakan setelah terlebih dahulu membangun sistem pengumpulan data secara memadai.

##### **1. PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja sasaran yang hendak dicapai dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab jika dijumpai celah kinerja (*performance gap*) serta upaya-upaya perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Hal ini bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana misi suatu organisasi telah diwujudkan.

Ikhtisar pengukuran kinerja keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategik dapat dilihat pada Formulir Pengukuran Pencapaian

Sasaran (PPS) Lampiran 2. Sedangkan pengukuran kinerja kegiatan dapat dilihat pada Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Lampiran 3.

## **2. EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA**

Secara umum dari sasaran stratejik yang telah ditetapkan oleh DPMD Kabupaten Enrekang telah dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Keberhasilan ini terlihat dari capaian indikator sasaran yang mencapai target yang diharapkan. Di sisi lain, keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran tak lepas dari keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan pada masing-masing bagian organisasi.

### **a. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Strategi**

DPMD Kabupaten Enrekang telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari semua sasaran yang telah ditetapkan, hampir seluruhnya telah mencapai target kinerja yang diharapkan. Hal ini terlihat dari capaian sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat *outcome*.

DPMD Kabupaten Enrekang tahun 2018 mengadakan pengukuran capaian kinerja pada seluruh kegiatan yang sumber dananya berasal dari APBD. Dengan diterapkannya Anggaran Berbasis Kinerja, maka indikator kegiatan yang digunakan dalam pengukuran kinerja menggunakan sumber data dari Dokumen Anggaran Satuan Kerja. Realisasi capaian kinerja sasaran secara keseluruhan adalah sebesar 100% yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Berdasarkan Rencana Strategis DPMD Kabupaten Enrekang dan Rencana Kinerja DPMD Kabupaten Enrekang, maka capaian kinerja sasaran strategis secara kuantitatif dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan.

Target dan capaian indikator keberhasilan sasaran terlaksananya pembangunan sesuai dengan rencana adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
Jumlah Posyandu yang - terbina	Posyandu	60 Posyandu.	60 Posyandu.	100,00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang di tahun 2018 telah berupaya mencapai target indikator kinerja sasaran Meningkatnya Peran Perempuan di pedesaan dalam Pembangunan melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan :

- Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

### 2. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan/ kelurahan.

Target dan capaian indikator adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
Jumlah Kader Desa yang - diidentifikasi, terbina dan dikembangkan terkait Kerjasama Desa	DESA	24 DESA	24 DESA	100,00
Persentase realisasi - pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	%	100 %	100 %	100,00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang di tahun 2018 telah berupaya mencapai target indikator kinerja sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan :

- Koordinasi dan Pendampingan Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat

- Pengembangan Kerjasama Desa

### 3. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.

Target dan capaian indikator Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
Jumlah BUMDES yang - dibentuk / difasilitasi	BUMDES	105 BUMDES	105 BUMDES	100,00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang di tahun 2018 telah berupaya mencapai target indikator kinerja sasaran Terwujudnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkualitas melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan :

- Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa
- Pelatihan Jenis Usaha Kegiatan BUMDES
- Expo Ekonomi Kreatif
- Pengembangan Kawasan Perdesaan

### 4. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Target dan capaian indikator keberhasilan sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
Tingkat partisipasi - masyarakat dalam Pembangunan	%	90 %	90 %	100,00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang telah berupaya mencapai target indikator kinerja sasaran melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Lomba Pembangunan Desa / Kelurahan

### 5. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Target dan capaian indikator keberhasilan sasaran Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
Jumlah Aparatur - Pemerintahan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	314 Orang	314 Orang	100,00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang telah berupaya mencapai target indikator kinerja sasaran melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Bimbingan Teknis dan Penginputan Data Profil Desa / Kelurahan

### 6. Program Pembinaan Administrasi serta Penataan Pemerintahan dan Wilayah Administratif Desa/Kelurahan

Target dan capaian indikator adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
Prosentase Desa/ - Kelurahan yang memiliki data base dan administrasi sesuai ketentuan	%	90 %	90 %	100,00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang di tahun 2018 telah berupaya mencapai target indikator kinerja sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan yang baik melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan :

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan AAD dan DD.
- Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan.
- Pembinaan dan Penyusunan RKP Desa.
- Sosialisasi Peraturan Tentang Desa / Sosialisasi Hukum.

- Pendampingan dan Pengawasan atas penyampaian laporan pertanggungjawaban kepala Desa.
- Bimbingan / Pendampingan Penyusunan APBDesa.
- Pendampingan penyusunan laporan keuangan berbasis aplikasi.
- Review laporan pertanggungjawaban keuangan Desa.
- Pembentukan, Pengelolaan dan pengembangan Desa Percontohan/Laboratorium Lapang.

### **7. Program Pengembangan Kelembagaan Masyarakat di Perdesaan / Kelurahan**

Target dan capaian indikator keberhasilan sasaran Meningkatnya partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan adalah sebagai berikut :

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% CAPAIAN TARGET</b>
Jumlah Pengurus BPD dan LKSMD/K yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	100 Orang	100 Orang	100,00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang telah berupaya mencapai target indikator kinerja sasaran melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Pendataan, Pembinaan dan Monitoring Kelembagaan BPD dan LKSMD/K.
- Pelatihan Penguatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

### **8. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)**

Target dan capaian indikator keberhasilan sasaran adalah sebagai berikut:

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% CAPAIAN TARGET</b>
Jumlah KUKM/Kel Tani yang memanfaatkan TTG	Kelompok	172 Kelompok	172 Kelompok	100,00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang telah berupaya mencapai target indikator kinerja sasaran Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam berbasis teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Posyantek.
- Pelaksanaan Gelar TTG Tingkat Kabupaten, Regional dan Tingkat Nasional.
- Fasilitasi dan dukungan alat Teknologi Tepat Guna.
- Monitoring dan Evaluasi Bantuan Alat TTG.
- Sosialisasi dan pembinaan Desa Hijau.
- Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata.

### **9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Target dan capaian indikator keberhasilan sasaran Meningkatnya Pelayanan Aparatur dalam Melaksanakan Tugas sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah sebagai berikut :

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% CAPAIAN TARGET</b>
Tingkat Pelayanan Adminsitrası perkantoran sesuai standar dan prosedur yang ada	%	100 %	100 %	100,00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang telah berupaya mencapai target indikator kinerja sasaran Meningkatnya Pelayanan Aparatur Dalam Melaksanakan Tugasnya sesuai dengan Tupoksinya melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
- Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- Koordinasi, konsolidasi dalam daerah dan peninjauan lapangan
- Pengelolaan administrasi keuangan dan perkantoran

- Penyediaan peralatan kebersihan dan perlengkapan dapur kantor

Dari indikator kinerja yang ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan sasaran tersebut, telah mencapai target 100%

#### **10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Target dan capaian indikator keberhasilan sasaran Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur adalah sebagai berikut :

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% CAPAIAN TARGET</b>
Tingkat pemenuhan kebutuhan Saprasi dasar Perkantoran (Peralatan dan Perlengkapan)	%	90 %	90 %	100,00

Dari indikator kinerja yang ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan sasaran meningkatnya sarana dan prasarana aparatur telah mencapai target. Target tersebut tercapai melalui kegiatan:

- Pengadaan peralatan gedung kantor
- Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional
- Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor.

#### **11. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Target dan capaian indikator keberhasilan sasaran terbentuknya kualitas aparatur yang berkualitas dan profesional adalah sebagai berikut :

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% CAPAIAN TARGET</b>
Tingkat kompetensi aparatur sesuai tugas pokok dan fungsi	%	85 %	85 %	100,00



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang telah berupaya mencapai target indikator kinerja sasaran terbentuknya kualitas aparatur yang berkualitas dan profesional melalui kegiatan sebagai berikut :

- Diklat teknis tugas dan fungsi bagi PNS

Dari indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, telah mencapai target yang ditetapkan.

## **12. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Target dan capaian indikator keberhasilan sasaran terciptanya dokumen laporan dan rencana kerja SKPD adalah sebagai berikut :

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% CAPAIAN TARGET</b>
Tingkat ketersediaan pelaporan kinerja dan keuangan yang dipersyaratkan	%	100 %	100 %	100,00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang telah berupaya mencapai target indikator kinerja sasaran terciptanya dokumen sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan melalui kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisiar realisasi kinerja SKPD.
- Penyusunan pelaporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan akhir tahun.

Dari indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, seluruhnya telah mencapai target yang ditetapkan.

## **13. Program Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran SKPD**

Target dan capaian indikator keberhasilan sasaran Prosentase penyusunan dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
Jumlah Dokumen - Penganggaran SKPD yang diterbitkan	Dokumen	4 Dok.	4 Dok.	100,00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang telah berupaya mencapai target indikator kinerja sasaran tersedianya dokumen sinkronisasi dan penganggaran SKPD melalui kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan RKA - SKPD
- Penyusunan DPA - SKPD
- Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Dari indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, telah mencapai target yang ditetapkan.

#### **b. Strategi Pemecahan Masalah**

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang menetapkan strategi-strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
2. Meningkatkan pembinaan, sosialisasi, studi kerja dan pelatihan dalam hal pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) serta pemberian bantuan alat-alat TTG kepada kelompok masyarakat.
3. Meningkatkan peran dan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa;
4. Melaksanakan penghimpunan data base kelembagaan, profil desa dan monografi desa serta updating data;
5. Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, pendampingan, monitoring terkait implementasi regulasi tentang desa dan dana desa;
6. Pemantapan aturan, sosialisasi, pemantauan terkait pemilihan kepala desa;
7. Melestarikan budaya gotong royong masyarakat dan adat istiadat masyarakat;

8. Penambahan aparatur dan peningkatan kapasitas aparatur DPMD;
9. Peningkatan peran P3MD terkait pemberdayaan masyarakat dan Desa;
10. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan capaian kinerja.

**c. Analisis atas Capaian Keuangan**

Pada Tahun Anggaran 2018, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Enrekang memperoleh alokasi dana sebesar :

sebelum perubahan Rp. 5.126.876.764,- terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung : Rp. 1.743.114.764,-

- Belanja Langsung : Rp. 3.838.762.000,-

Setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 4.834.501.282,- terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung : Rp. 1.654.842.682,-

- Belanja Langsung : Rp. 3.179.658.600,-

Realisasi penggunaan keuangan belanja langsung sampai dengan akhir Desember 2018 sebesar Rp. 4.827.404.158,- (99,44 %) dan sisa anggaran sebesar Rp. 7.097.124,-.

Terjadinya sisa Anggaran karena :

- Kegiatan “Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik” anggaran Rp. 36.180.000,- realisasi Rp. 35.408.436,- sisa anggaran Rp. 771.564,- merupakan biaya Telepon dan Air yang tidak digunakan.
- Kegiatan “Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan” anggaran Rp. 10.350.000,- realisasi Rp. 9.795.000,- sisa anggaran Rp. 555.000,- terdapat tiga buletin/majalah yang berhenti berlangganan.

- Kegiatan “Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional” anggaran Rp. 50,000,000,- realisasi Rp. 48.900.940,- sisa anggaran Rp. 1.099.060,- merupakan selisih biaya STNK.
- Kegiatan “Koordinasi dan Pendampingan Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat” anggaran Rp. 132.220.000,- realisasi Rp. 128.170.000,- sisa anggaran Rp. 4.050.000,- merupakan selisih Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dan Belanja Bahan Spanduk.
- Kegiatan “Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan” anggaran Rp. 28.748.500,- realisasi Rp. 28.738.500,- sisa anggaran Rp. 10.000,- merupakan selisih makanan dan minuman Rapat.
- Kegiatan “Pembinaan dan Penyusunan RKP Desa ” anggaran Rp. 60,000,000,- realisasi Rp. 59.600.000,- sisa anggaran Rp.400.000,- merupakan selisih Belanja narasumber.
- Kegiatan “Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi posyantek” anggaran Rp.20.000.000,- sisa anggaran Rp. 211.500,- merupakan selisih dari Belanja Dinas perjalanan Luar Daerah.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang Tahun 2018 dibiayai dengan anggaran yang tertuang dalam APBD Tahun 2018. Adapun rata-rata realisasi capaian target keuangan per kegiatan sebesar 99,44 % atau hampir seratus persen yang dihitung dari jumlah rata-rata realisasi keuangan setiap kegiatan.

APBD DPMD Kab. Enrekang TA. 2018, secara garis besar terdiri dari dua bagian yaitu, Belanja langsung dan Belanja tidak langsung.

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
<b>I</b>	<b>BELANJA</b>			
1.	Belanja Langsung	3.179.658.600,00	3.172.561.476,00	99,44
2.	Belanja Tidak Langsung	1.654.842.682,00	1.654.842.682,00	100,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	4.834.501.282,00	4.827.404.158,00	99,81
	<b>Surplus / Defisit</b>	0	7.097.124,00	

Target dan realisasi atas capaian keuangan per masing-masing kegiatan di DPMD Kab. Enrekang adalah sebagai berikut :

PROGRAM	KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
<b>Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan</b>	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	680.000.000	680.000.000	100
<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.180.000	35.408.436	93
	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik / Penerangan Kantor	1.000.000	1.000.000	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.350.000	9.795.000	93
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	194.527.600	194.527.600	100,00
	Koordinasi, Konsolidasi dalam Daerah dan Peninjauan Lapangan	60.000.000	60.000.000	100,00
	Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perkantoran	266.050.000	266.050.000	100,00
	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Perlengkapan Dapur Kantor	4.000.000	4.000.000	100,00

<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>TARGET (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	69.000.000	69.000.000	100,00
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	21.690.000	21.690.000	100,00
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	50.000.000	48.900.940	98,8
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	10.000.000	10.000.000	100,00
<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Diklat Tekhnis dan Fungsi bagi PNS	36.579.000	36.579.000	100,00
<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	2.000.000	100,00
	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Akhir Tahun	2.000.000	2.000.000	100,00
<b>Sinkronisasi dan Penganggaran SKPD</b>	Penyusunan RKA-SKPD	2.000.000	2.000.000	100,00
	Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000	2.000.000	100,00
	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	2.000.000	2.000.000	100,00
<b>Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan</b>	Koordinasi dan Pendampingan Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat	132.220.000	128.170.000	99,60
	Pengembangan Kerjasama Desa	20.000.000	20.000.000	100,00
<b>Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</b>	Pelatihan Jenis Usaha Kegiatan BUMDES	25.000.000	25.000.000	100,00
	Pembinaan dan pengembangan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa	79.254.000	79.254.000	100,00
	Pengembangan Kawasan Perdesaan	19.150.000	19.150.000	100,00
	Expo Ekonomi Kreatif	30.000.000	30.000.000	100,00

PROGRAM	KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
<b>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa</b>	Lomba Pembangunan Desa	123.000.000	123.000.000	100,00
<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa</b>	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	79.265.500	79.265.500	100,00
	Bimbingan Tekhnis dan Penginputan Data Profil Desa/Kelurahan	48.160.000	48.160.000	100,00
<b>Pembinaan Administrasi serta Penataan Pemerintahan Desa</b>	Pembinaan dan Penyusunan RKP Desa	60.000.000	59.600.000	99,60
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan AAD dan DD	59.584.000	59.584.000	100,00
	Pembinaan Administrasi / Kelurahan	28.748.500	28.738.500	99,99
	Penyusunan dan pendayagunaan data Profil Desa dan Kelurahan	44.840.000	44.840.000	100,00
	Sosialisasi peraturan tentang Desa / Sosialisasi Hukum	50.000.000	50.000.000	100,00
	Pendampingan dan pengawasan atas Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa	22.412.000	22.412.000	100,00
	Bimbingan / Pendampingan Penyusunan APBDesa	45.000.000	45.000.000	100,00
	Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan berbasis Aplikasi	40.000.000	40.000.000	100,00
	Review Laporan Pertanggungjawaban Keuangan desa	54.144.000	54.144.000	100,00
	Pembentukan, pengelolaan dan pengembangan Desa Percontohan/Laboratorium Lapang (LABSITE) PMD	15.000.000	15.000.000	100,00
<b>Pengembangan Kelembagaan Masyarakat di</b>	Pendataan, Pembinaan dan Monitoring Pengurus BPD dan LKSMDK	28.000.000	28.000.000	100,00

<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>TARGET (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Pedesaan / Kelurahan</b>	Pelatihan Penguatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	19.254.000	19.254.000	100,00
<b>Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)</b>	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Posyantek	20.000.000	19.788.500	99,98
	Pelaksanaan Gelar TTG tingkat Kabupaten, Regional dan Tingkat Nasional	54.900.000	54.900.000	100,00
	Fasilitasi dan Dukungan Alat Teknologi Tepat Guna (TTG)	589.420.000	589.420.000	100,00
	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Alat TTG	20.000.000	20.000.000	100,00
	Sosialisasi dan Pembinaan Desa Hijau	7.930.000	7.930.0000	100,00
	Pembinaan dan pengembangan Desa Wisata	15.000.000	15.000.000	100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>3.179.658.600</b>	<b>3.172.561.476</b>	<b>99,44</b>

Berdasarkan hasil capaian keuangan realisasi kegiatan di tahun 2018 khusus Belanja Langsung bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menyerap anggaran sebesar 99,44 %, atau dari total anggaran kegiatan/belanja langsung Rp. 3.179.658.600,- dapat terealisasi sebesar Rp. 3.172.561.476,-.



## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang tahun 2018 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik yang diamanatkan kepada organisasi. Disisi lain, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja DPMD Kabupaten Enrekang sebagai upaya untuk perbaikan kinerja di masa datang.

DPMD Kab. Enrekang secara umum telah berhasil mencapai target kinerja sasaran. Pada Tahun Anggaran 2018 terdapat 45 kegiatan yang telah mencapai target sasaran 100 % dan total realisasi penggunaan anggaran kegiatan sebesar 99,44 %.

Untuk mempertahankan capaian kinerja di masa mendatang DPMD Kab. Enrekang telah menetapkan beberapa strategi, antara lain dengan meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan, peningkatan kemampuan pengelola kegiatan, penyempurnaan implementasi anggaran berbasis kinerja dan perluasan jangkauan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan.

Semoga laporan ini memberikan arti bagi peningkatan pencapaian kinerja sasaran dan lebih mendorong upaya untuk mewujudkan cita-cita dan harapan pemerintah dan masyarakat.

Enrekang, 31 Januari 2018

Plt. Kepala DPMD Kab. Enrekang

**Dra. Hj. ZUBAEDAH BANDO, M.AP**

Pangkat : Pembina Utama Muda

N I P. : 19671231 199312 2 007

